

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2022

KECAMATAN PRAMBON



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN PRAMBON
Jln. Diponegoro No. 120 Telp. (031)8971008 Kode Pos 61264
Prambon - Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunianya hingga tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis untuk mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026. Secara khusus Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun anggaran kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Prambon, 5 Maret 2021



CAMAT PRAMBON

RONNY YULIANOWARSO, AP, M.HP

Pembina Tk.I

Nip. 19750709 199501 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN PRAMBON**

JL. DIPONEGORO NO 120 PRAMBON

Telp. (031) 8971008

Email : kecamatanprambon@gmail.com Website : sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PRAMBON
NOMOR : 188/27/438.7.14/2021**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PRAMBON

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, bahwa Rancangan akhir Renja PD yang telah diverivikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Camat Prambon tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286).

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang "Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah "
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025.
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;

25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo

26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU Keputusan Camat Prambon tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
- KEDUA** Keputusan Camat Prambon tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, menjadi Pedoman Kecamatan Prambon dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) PD;
- KETIGA** Agar menyelaraskan Renja PD dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) PD;
- KEEMPAT** Apabila terjadi perubahan APBD 2022, maka usulan Perubahan Anggaran dan Kegiatan (PAK) PD harus mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan pada Renja PD.
- KELIMA** Keputusan Camat Prambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Prambon, 5 Maret 2021



RONNY YULIANOWARSO, AP.M.HP

Pembina Tk.I

Nip. 19750709 199501 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum Penyusunan.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	10
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PRAMBON TAHUN LALU	 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD.....	 11
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	 15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD.....	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
 BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	 35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD	36
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	37
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB IV. PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan.....9

Tabel 2.1 Program Kegiatan Kecamatan Prambon TA. 2020 11

Tabel 2.4.1 Reviu terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2022
Kecamatan Prambon27

Tabel 3.3 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022...34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Kecamatan Prambon Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Kecamatan Prambon menjabarkan serta arah pembangunan Kecamatan Prambon yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Renja-OPD Kecamatan Prambon ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana (Renja) Kecamatan Prambon Tahun 2022 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentnag Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025.
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Prambon Tahun 2022 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian Visi yang ditegaskan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu :*“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan* berisi tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Prambon disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.3.1 Visi dan Misi SKPD

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan, kemana arah dan tujuan serta bagaimana suatu organisasi harus dibawa agar senantiasa berkarya serta menciptakan suatu prakarsa dan ide-ide agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Begitu pula Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, melalui Misi-misinya berupaya mewujudkan Visi-nya untuk periode 2021 – 2026 mendatang. Adapun visi dan misi OPD telah terintegrasi dengan Visi-Misi Kabupaten Sidoarjo, dimana masing-masing OPD akan mewujudkan Visi dengan jalan menjalankan Misi sesuai dengan bidangnya. Visi Kabupaten Sidoarjo adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”

Kecamatan Prambon sebagai OPD dengan unit pelayanan, menjalankan dua misi RPJMD :

Misi Satu :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;

Misi Dua : Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

Dalam menjalankan misinya, Kecamatan Prambon berupaya meningkatkan kualitas perangkat daerah (PD) dan Perekonomian sehingga akan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan serta Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing.

1.3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Prambon akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Prambon tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.2 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Prambon

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	1. Meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan	2.1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang

	pemerintahan desa	didelegasikan ke Kec. Prambon dilaksanakan dengan baik 2.2. Persentase Desa Maju Kecamatan Prambon
--	-------------------	--

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Prambon Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan HukumPenyusunan
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PRAMBON TAHUN LALU
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD
 - 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD
 - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PRAMBON TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu Kecamatan Prambon, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Prambon untuk tahun anggaran 2020 melaksanakan 2 program dan 23 Kegiatan dengan jumlah anggaran setelah Perubahan Kegiatan/ PAK adalah sebesar Rp. 2.342.220.635,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.951.926.003,00 atau 83,34% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Program Kegiatan Kecamatan Prambon Tahun Anggaran 2020
Kabupaten Sidoarjo

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN Rp	REALISASI TH. 2020	
		Rp	%
Program Pelayanan Kesekretariatan	1.746.727.175,00	1.431.896.597,00	81,98
Penyediaan barang/jasa perkantoran	771.961.940,00	591.313.475,00	76,60
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	135.420.535,00	76.769.000,00	56,69
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	479.589.500,00	445.395.213,00	92,87
Pemeliharaan sarana dan	341.258.000,00	303.197.899,00	88,85

prasarana aparatur			
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	6.620.900,00	5.242.025,00	79,17
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	6.606.900,00	5.853.740,00	88,60
Penyusunan laporan keuangan	5.269.400,00	4.125.245,00	78,29
Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	595.493.460,00	520.029.406,00	87,33
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	27.000.000,00	16.380.000,00	60,67
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	1.125.000,00	1.050.000,00	93,33
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.100.000,00	6.720.000,00	82,96
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pembangunan dan	12.385.400,00	9.436.500,00	76,19

Lingkungan			
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan	14.875.000,00	13.228.000,00	88,93
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Perekonomian	3.900.000,00	3.360.000,00	86,15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	1.800.000,00	1.680.000,00	93,33
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan	10.035.600,00	10.035.600,00	100,00
Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	11.839.860,00	2.525.000,00	21,33
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan IMB, Usaha Mikro dan IMB Rumah Tinggal	3.435.000,00	3.306.000,00	96,24
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan SIUP, TDP Usaha Mikro	2.890.000,00	2.764.000,00	95,64
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perbup, Pengawasan dan Penertiban Usaha,	202.435.400,00	180.215.584,00	89,02

Penanganan Konflik Sosial			
Pembinaan Lembaga, Kegiatan Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah Domestik	149.611.200,00	145.946.722,00	97,55
Pembinaan Perangkat Desa	6.925.000,00	6.325.000,00	91,34
Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima	7.156.000,00	0,00	0,00
Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	131.980.000,00	117.057.000,00	88,69

2.2. Analisa Kinerja Kecamatan Prambon

Berdasarkan Permenpan No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kecamatan Prambon dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada masyarakat menetapkan ketentuan dan persyaratan sesuai standart operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pemohon maupun oleh petugas pelayanan administrasi di Kecamatan Prambon.

Jenis-jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Prambon adalah pelayanan masyarakat di bidang administrasi meliputi :

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pelayanan Pembuatan Surat Pindah
4. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Waris

5. Pelayanan Legalisasi dokumen kependudukan
6. Pelayanan Kartu Kuning AK1
7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Pelayanan pemrosesan permohonan perijinan SIUP, TDP Usaha Mikro
9. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
10. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Prambon

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Prambon

Dalam rangka pelayanan kinerja Kecamatan Prambon memberdayakan SDM yang sudah memadai dari segi kuantitas namun masih kurang dari segi kualitas.

Struktur Organisasi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- Unsur Pimpinan : Camat
- Unsur Pembantu Pimpinan (Sekretaris camat) terdiri dari :
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Subbag Perencanaan dan Keuangan
- Unsur Pelaksana, Seksi-Seksi antara lain:
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Seksi Perekonomian
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pembangunan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan hasil analisis terhadap Indikator Kinerja Tujuan di tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja tujuan, yang selanjutnya membandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun sebelumnya (selama periode Renstra), maka isu-isu strategis yang terkait adalah:

1. Jumlah sumber daya manusia bidang teknis masih belum tercukupi secara kuantiti maupun kualitas akan tetapi pihak kecamatan tetap mengupayakan sumber daya yang ada dengan cara mengintensifkan pendampingan dan pelatihan teknis.
2. Peran Kecamatan Prambon cukup strategis dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati ke Kecamatan akan tetapi tidak diimbangi dengan anggaran yang memadai.
3. Sarana dan Prasarana sudah cukup memadai (kondisi gedung, komputer, kendaraan dan alat-alat perkantoran pendukung lainnya) akan tetapi ada program kabupaten yaitu TPST yang semula sudah dirancang dengan bagus menjadi mentah lagi dikarenakan berubahnya kebijakan kabupaten akan tetapi Kecamatan Prambon berinisiatif tetap menjalankan program itu melalui dana APBDes.
4. Ada beberapa desa yang memiliki perangkat desa dimana etos kerjanya kurang bagus sehingga mengakibatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa kurang maksimal (penyusunan APBDes, Musrenbangdes, LPPD), akan tetapi pihak Kecamatan Prambon tiada henti tetap mendampingi Perangkat Desa agar kinerja desa semakin baik.
5. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang dapat menjadi kepuasan masyarakat, kecamatan prambon terus berusaha memberikan yang pelayanan yang terbaik sesuai dengan ketentuan yang ada, dan terus memaksimalkan pelayanan yang menjadi tugas dari kecamatan prambon. Melalui hasil dari survey kepuasan masyarakat kecamatan prambon dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan yang ada.
6. Peran desa dalam mewujudkan desa mandiri, dimana kinerja desa masih belum maksimal dalam penyampaian dan pengisian data desa terkait desa mandiri. Desa di Kecamatan Prambon menurut data statistik Indeks Desa Membangun Tahun 2020 tergolong

desa Maju. Oleh karena itu pihak kecamatan akan terus mendampingi agar desa di kecamatan prambon tergolong dalam desa mandiri.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2026 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2022-2026. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis setiap satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD kabupaten sidoarjo tahun 2022-2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas-bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama priode berikutnya, untuk itulah Kecamatan Prambon tahun 2022-2026 menyusun Renstra untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien

sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah diterapkan.

2. Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Prambon

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Prambon tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Kurang tertibnya administrasi perkantoran di tingkat kecamatan maupun desa;
2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan pelayanan ataupun sosialisasi;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Jumlah serta kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; terkait mensukseskan program PATEN;
5. Masih ada aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
6. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*;
7. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki, mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
8. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Desa kepada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo;
9. Belum akuratnya data potensi seluruh desa, masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan Daerah. Serta sulitnya koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan;
10. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
11. Adanya wabah COVID-19 menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran yang cukup signifikan dikarenakan anggaran akan

dialihkan ke Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan COVID-19;

12. Belum optimalnya realisasi anggaran kegiatan serta realisasi kinerja dikarenakan adanya wabah COVID-19.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Penyerahan urusan di berbagai bidang kepada Pemerintah Daerah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan tidak terkecuali dalam hal regulasi kelembagaan pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan kelembagaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Kecamatan, yang implementasinya diapresiasi melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 04 tahun 2019 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Camat disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan tugas dibidang Pembangunan dan bidang Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Untuk pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;

3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui meningkatkan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya; dan
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Misi ini merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten sidoarjo dalam menjamin tersedianya aparatur pemerintah daerah yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Dalam artian memiliki memadai secara kuantitas, dan memiliki kapasitas, komitmen dan inovasi yang tinggi terhadap upaya peningkatan kinerja. Selain itu, misi ini adalah upaya pemerintah kabupaten sidoarjo dalam meningkatkan kualitas organisasi perangkat daerah (PD) dan tatakelola pemerintahan daerah yang aspiratif, partisipatif dan transparan, sehingga terwujud organisasi perangkat daerah yang tetap, ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, serta terwujudnya tatakelola pemerintah desa yang baik.
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Dengan misi ini, pemerintah kabupaten sidoarjo berupaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada sektor potensial (industri pengolahan, perdagangan, angkutan dan komunikasi, jasa) yang didukung oleh perkembangan sektor primer (pertanian, perikanan, kelautan). Meningkatkan ketahanan pangan kabupaten sidoarjo. Serta meningkatkan kelembagaan

ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Misi ini berupaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan yang baik, serta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman bebas kumuh, air bersih, dan sanitasi serta drainase. Meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang diharapkan akan meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi melalui pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha terkait, mewujudkan tata ruang sebagai skenario penanggulangan banjir, serta meningkatkan konservasi lingkungan dan pemanfaatan energi terbarukan.
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui meningkatkan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Dalam misi ini tertuang upaya pemerintah kabupaten sidoarjo untuk :
 - a. Mewujudkan Pendidikan Dasar 9 tahun yang unggul, sehingga menjamin akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat hingga 9 tahun yang unggul serta tersedianya kebijakan dan manajemen pendidikan yang mendukung terwujudnya pendidikan yang unggul.
 - b. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas dan berdaya saing, yang akan meningkatkan kualitas SDM guru dan tenaga pendidikan dan tersedianya sarana prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas.
 - c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan terwujudnya tatakelola pelayanan kesehatan yang menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

- d. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok desa, dengan harapan akan meningkatkan ketersediaan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata hingga di pelosok desa serta meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- 5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga. Misi ini merupakan upaya pemerintah kabupaten sidoarjo untuk :
 - a. menciptakan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah sehingga tercipta keharmonisan sosial.
 - b. menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib, dengan harapan menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat dan meningkatnya pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjunjung supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM.
 - c. Selain itu juga merupakan upaya untuk revitalisasi nilai dan potensi kearifan lokal yang akan menguatkan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan.
- 6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Prambon mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Dengan sasaran yang ditetapkan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
2. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Prambon

Berikut adalah analisa tantangan dan peluang baik Kantor Kecamatan Prambon dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- **Peluang**

1. Perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik.
2. Ketersediaan anggaran untuk pelatihan pengelolaan anggaran dana desa.
3. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Prambon untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.

Selain memiliki beberapa peluang, ternyata Kecamatan Prambon memiliki beberapa tantangan yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- **Tantangan**

1. Kurangnya pemahaman terhadap SOP pelayanan.
2. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
3. Kurangnya kemampuan pengelolaan anggaran dana desa.

4. Belum meratanya kemampuan (kompetensi) Aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan.

5. Isu-isu Strategis Kecamatan Prambon

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Yang menjadi Kelompok Sasaran untuk setiap program/kegiatan adalah masyarakat dan PD yang bersangkutan dan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategi sebagai berikut :

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

STRATEGI

1. Perbaikan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana pelayanan
2. Mengirimkan aparatur untuk menjalani tugas pelatihan dan pendidikan
3. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
4. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
5. Pendampingan pelaksanaan pemerintahan desa
6. Menerapkan standar pelayanan umum dengan menyusun SOP pelayanan yang jelas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Prambon tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki.
2. Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak.
3. Belum akuratnya data potensi seluruh desa/masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah.
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*.
5. Inventarisasi aset daerah yang belum tertata dengan rapi.
6. Belum optimalnya pencapaian tujuan program-program berkaitan dengan pelatihan kewirausahaan.
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prambon serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD kabupaten Sidoarjo disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasimasyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi

keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Prambon diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD tahun 2022 Kecamatan Prambon mengusulkan 5 Program, 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Prambon mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel : 2.4.1
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec Prambon	a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SP Dan SOP b. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti Bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Lingkungan, Dan Perekonomian c. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun Dokumen Pemutakhiran Data Indeks	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	89.959.375	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec Prambon	a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SP Dan SOP b. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti Bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Lingkungan, Dan Perekonomian c. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun Dokumen Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Secara	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	89.959.375

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Desa Membangun (IDM) Secara Valid d. Prosentase Desa Yang Menyusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu Dokumen : Perencanaan , Penganggaran Dan Pelaporan					Valid d. Prosentase Desa Yang Menyusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu Dokumen : Perencanaan , Penganggaran Dan Pelaporan		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kec Prambon	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SP Dan SOP	100%	3.900.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kec Prambon	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SP Dan SOP	100%	3.900.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kec Prambon	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama Dan Kemasyarakatan Yang Diitindaklanjuti Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	63.621.875	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kec Prambon	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama Dan Kemasyarakatan Yang Diitindaklanjuti Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	63.621.875

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Yang Ditinjaulanjuti Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian Yang Ditinjaulanjuti					Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Yang Ditinjaulanjuti Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian Yang Ditinjaulanjuti		
	Pelaksanaan Urusan Dilimpahkan Kepada Camat	Kec Prambon	Prosentasae Pelaksanaan Urusan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	15.175.000	Pelaksanaan Urusan Dilimpahkan Kepada Camat	Kec Prambon	Prosentasae Pelaksanaan Urusan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	15.175.000
	Program Koordinasi Ketertiban Umum	Kec Prambon	a. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditinjaulanjuti b. Persentase Temuan	a. 100% b. 100%	79.648.392	Program Koordinasi Ketertiban Umum	Kec Prambon	a. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditinjaulanjuti b. Persentase Temuan	a. 100% b. 100%	79.648.392

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelanggaran Perda Dan Konflik Yang Ditangani					Pelanggaran Perda Dan Konflik Yang Ditangani		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kec Prambon	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditinjaulanjuti	100%	64.770.892	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kec Prambon	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditinjaulanjuti	100%	64.770.892
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec Prambon	Prosentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditindaklanjuti	100%	14.877.500	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec Prambon	Prosentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditindaklanjuti	100%	14.877.500
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Prambon	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	75.281.308	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Prambon	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	75.281.308

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Prambon	Jumlah Acara yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari besar nasional	2 Kali	75.281.308	Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Prambon	Jumlah Acara yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari besar nasional	2 Kali	75.281.308
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Prambon	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	31.900.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Prambon	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	31.900.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Prambon	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	31.900.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Prambon	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	31.900.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec Prambon	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	7.254.706.094	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec Prambon	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	7.254.706.094

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Prambon	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	90%	22.193.308	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Prambon	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	90%	3.990.855.713
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Prambon	Persentase realisasi anggaran PD	90%	4.642.512.159	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Prambon	Persentase realisasi anggaran PD	90%	4.642.512.159
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Prambon	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%	17.502.237	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Prambon	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%	17.502.237
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Prambon	Persentase realisasi anggaran PD	90%	465.650.150	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Prambon	Persentase realisasi anggaran PD	90%	465.650.150
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec Prambon	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	3 jenis	356.799.694	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Prambon	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	3 jenis	356.799.694

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Prambon	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	867.548.546	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Prambon	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	867.548.546
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Prambon	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	11 unit	882.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Prambon	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	11 unit	882.500.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo baik itu dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan Nasional. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 secara berjenjang mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten termasuk forum Perangkat Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Musrenbang Berbasis Online. Usulan program dan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Dan fungsi Kecamatan Prambon sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan *good governance* dan *excellence service*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Prambon dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Prambon

Pemerintahan Kecamatan Prambon merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021 - 2026 adalah : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan dan mempunyai 5 misi, Kecamatan sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 1 dan 2 yaitu :

Misi Satu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;

Misi Dua : Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Prambon mempunyai *tujuan* dan sasaran yaitu :

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan
2. Meningkatkan kwalitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
2. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka pada tahun 2022 Kecamatan Prambon melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Prambon Tahun 2022 kurang lebih sama dengan RKPD hasil input di aplikasi SIPD dengan alamat sidoarjo.kab.sipd.kemendagri.go.id pada menu Rancangan Awal RKPD dengan rincian sebagai berikut :

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.254.706.094	
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22.193.308	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	7 dokumen	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	10.218.698	
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	2.291.330	
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah Dokumen Monev PD yang disusun	4 Laporan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	9.683.280	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.642.512.159	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	30 orang	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	4.636.700.948	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	1 laporan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	1.955.989	
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semes teran SKPD	Kab. Sidoarjo, Prambon, Semua Kelurahan	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah laporan Keuangan bulanan/ semester PD yang tersusun	12 Laporan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	3.855.222	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								17.502.237	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah Pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	43 stel	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	17.502.237	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								465.650.150	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah komponen listrik/ penerangan yang tersedia	139 buah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	12.511.259	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1368 buah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	51.555.471	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		1. Jumlah BBM yang tersedia 2. Jumlah Logistik rumah tangga yang tersedia	1 Tahun 0 Buah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	139.200.000	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	7 jenis	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	11.813.531	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	1.668.672	
7	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah bahan/material yang tersedia	31 buah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	30.054.417	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		a. Jumlah Jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1100 kotak 1100 orang	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	68.846.800	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	100 % 300 kali	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	150.000.000	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								356.799.694	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	18 unit	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	293.285.497	
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	22 unit	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	63.514.197	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								867.548.546	
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2500 surat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	38.924.146	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	158.200.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar 4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	36 orang/bulan 48 orang/bulan 24 orang/bulan 156 orang/bulan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 nilai	670.424.400	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								882.500.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara dalam satu tahun 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia dalam satu tahun 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya dalam satu tahun	2 Unit 0 buah 2 Unit	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 %	46.000.000	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		1. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	17 Unit 0 buah 17 Unit	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 %	58.000.000	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah luas gedung/ kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi dalam satu tahun	233 M2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 %	693.500.000	
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon	Jumlah dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	14 Unit	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	80 %	108.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								89.959.375	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								63.621.875	
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon			a. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti b. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti c. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti d. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	3 kali 3 kali 3 kali 4 kali		63.621.875		
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								3.900.000	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon			a. Jumlah pelayanan umum yang telah diselesaikan b. Jumlah peserta sosialisasi Pelayanan Umum	4000 Dokumen 40 orang			3.900.000	
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								22.437.500	
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon			Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang telah diberi saran teknis	16 pemohon			5.125.000	
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon			a. Jumlah movev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya b. Jumlah movev bidang Pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya c. Jumlah movev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya d. Jumlah movev bidang perekonomian yang telah disusun laporannya	1 kali 0 kali 0 kali 0 kali			2.137.500	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon			a. Jumlah pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah b. Jumlah pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan c. Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan d. Prosentase jumlah SIUP usaha mikro yang diterbitkan e. Prosentase jumlah TDP usaha mikro yang diterbitkan	2 kali 2 kali 100 % 100 % 100 %			15.175.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								79.648.392	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								64.770.892	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	4 kali			5.950.000	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	3 kali			58.820.892	
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								14.877.500	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon			a. Jumlah temuan pelanggaran perda dan perkara yang ditindaklanjuti b. Jumlah temuan konflik sosial yang ditindaklanjuti	2 temuan 2 temuan			14.877.500	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								75.281.308	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								75.281.308	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon			a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati Hari besar Nasional	2 kegiatan 0 kegiatan			75.281.308	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								31.900.000	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								31.900.000	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon			b. Jumlah APBDes Perubahan yang telah dievaluasi Jumlah APBDes yang telah dievaluasi	20 Dokumen 20 Dokumen			19.600.000	

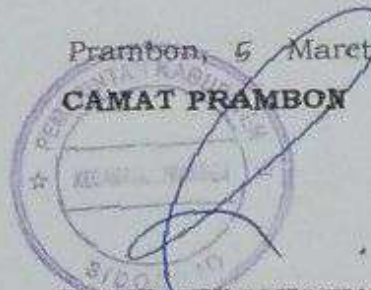
Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Prioritas Pembangun a n Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Sidoarjo, Prambon, Prambon			Jumlah Pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelapiran yang dilaksanakan	4 Pembinaan			12.300.000	
TOTAL													7.531.495.169	

BAB IV

PENUTUP

Renja Kecamatan Prambon ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prambon Tahun 2021 – 2026. Pada tahun 2022 Rencana Kerja Kecamatan Prambon ini terdapat 5 Program, 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2022. Rencana kerja Kecamatan Prambon Tahun 2022 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan**. Amien.

Prambon, 5 Maret 2021

CAMAT PRAMBON

RONNY YULIANOWARSO, A.P, M.HP
Pembina Tk.I
Nip. 19750709 199501 1 001